

# TINJAUAN LITERATUR: PETA POTENSI PENGENTASAN STUNTING DI KOTA MALANG

<sup>1</sup>Yoki Tulus Sabtian, <sup>2</sup>Durratun Nashihah, <sup>3</sup>Dewi Ariyanti Soffi

<sup>1</sup>Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia, <sup>2</sup>Center of Policy and Development Studies, <sup>3</sup>Center of Policy and Development Studies

*e-mail:* durratunn12@gmail.com

**DOI:** <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i2.204>

**Abstrak:** *Stunting* atau pendek merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penelitian ini bertujuan melihat potensi pengentasan *stunting* di Kota Malang dan menilai tingkat pencapaian Kebijakan Penanganan *Stunting* di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pencarian literaturnya menggunakan *database* penelitian *Google Scholar* dan *Pubmed*. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 3.084 anak atau 8,9% di Kota Malang punya risiko *stunting*. Jumlah itu merupakan hasil bulan timbang pada bulan Februari 2023 dari 34.382 anak. Dinas kesehatan Kota Malang terus berupaya menekan angka *stunting*. Pada tahun 2023 ini angka *stunting* diharapkan dapat turun sekitar 5%, serta Pemerintah Kota Malang telah membentuk Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS), kerjasama antar semua pihak dalam pengupayakan penurunan *stunting*.

**Kata kunci:** Pencegahan, Penurunan, Peta Potensi, *Stunting*

**Abstract:** *Stunting or short is a chronic malnutrition problem caused by lack of nutritional intake for a long time, resulting in impaired growth in children, namely the child's height is lower or shorter. This study aims to see the potential of stunting alleviation in Malang and assess the level of achievement of the Stunting Handling Policy in Malang City. This research uses the literature review method with literature search using Google Scholar and Pubmed research databases. The results showed that as many as 3,084 children or 8.9 percent in Malang City had a risk of stunting. That number is the result of the weighing month in February 2023 of 34,382 children. The Malang City Health Office continues to strive to reduce stunting. In 2023, the stunting rate is expected to decrease by around 5%, and the Malang City Government has formed a Team for the Acceleration of Stunting Handling (TPPS), a collaboration between all parties in striving to reduce stunting.*

**Keywords:** *Prevention, Reduction, Potential Map, Stunting*

## PENDAHULUAN

*Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak-anak terlalu pendek untuk usianya. Malnutrisi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun (Ministry of Rural Development and Transmigration, 2017). Terdapat 165 juta anak dibawah 5 tahun dengan kondisi pendek dan 90% lebih berada di Afrika dan Asia yang merupakan ancaman permasalahan gizi di dunia. Target global dalam menurunkan *stunting* yaitu sebanyak 40% pada tahun 2025 (Black et al., 2008).

Di Indonesia, *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius. Sekitar 37,5 juta orang menderita *stunting*, dan diseluruh dunia, Indonesia merupakan negara dengan angka *stunting* tertinggi kelima (TNP2K, 2017). Menurut Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi *stunting* di Indonesia adalah sekitar 30,8% pada anak usia dibawah lima tahun. Artinya, hampir satu dari tiga anak di Indonesia mengalami *stunting*. Pada tahun 2019, prevalensi anak pendek di bawah usia 5 tahun atau *stunting* di Indonesia sebesar 27,7% atau dengan kata lain 28 dari 100 balita menderita *stunting* (Badan Pusat Statistik, 2019). Dalam mengatasi angka kejadian *stunting*

terdapat dua solusi yaitu dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik ditujukan untuk mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung masalah gizi, sedangkan intervensi sensitif diarahkan untuk mengatasi akar masalahnya dan sifatnya jangka panjang.

Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Gizi yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019/Perpres No.2/2015 berupa intervensi gizi spesifik, dengan sasaran prioritas ibu hamil (selanjutnya digunakan istilah bumil), ibu menyusui dan anak 0-23 bulan. Intervensi dilakukan dengan pemberian makanan tambahan dan suplementasi tablet tambah darah. Selain itu, juga dilakukan intervensi gizi sensitif, berupa: (1) peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi; (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (3) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktek pengasuhan dan gizi ibu dan anak; dan (4) peningkatan akses pangan bergizi. Semua intervensi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat sebagai upaya pencegahan. *Stunting* adalah masalah kesehatan yang banyak ditemukan di negara berkembang, termasuk Indonesia. *Stunting* atau pendek merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (KEMENKES RI, 2018).

Percepatan penanganan *stunting* pada Tahun 2020 diperpanjang dari 160 kabupaten dan kota pada Tahun 2019 menjadi 260 kabupaten dan kota pada tahun 2020. *Stunting* diproyeksikan sebesar 19% pada tahun 2024 dibawah RPJMN 2020-2024, turun dari 30,8% sekarang. Upaya ini harus

dimaksimalkan dengan memberikan perawatan nutrisi yang terarah dan hati-hati. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan pada anak dibawah usia lima tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang menetap, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HKP). *Stunting* menghambat perkembangan otak dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan gangguan kronis dikemudian hari. *Stunting* dimulai sejak dalam kandungan dan tidak muncul dengan sendirinya sampai anak berusia dua tahun. UNICEF mendefinisikan *stunting* sebagai persentase anak usia 0 sampai 59 bulan yang lebih pendek dari dibawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga sentimeter (*stunting* kronis). Ini diukur dengan menggunakan kriteria pertumbuhan anak WHO.

Seperti diberitakan sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatatkan Indonesia sebagai negara ketiga paling pendek di Asia pada 2017. Namun, menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek menyatakan bahwa pada 2019, angka *stunting* menurun menjadi 27,67%, penurunan 10%. Namun, persyaratan WHO adalah 20%. Harap diingat bahwa Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan penelitian setiap lima tahun. Mereka mempelajari 84.000 anak sebagai bagian dari Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI). SSGBI 2019 dilakukan bersamaan dengan Susenas untuk mendapatkan gambaran status gizi yang meliputi *underweight*, *wasting*, dan *stunting*. Akibatnya, prevalensi gizi kurang atau gizi buruk pada Tahun 2019 sebesar 16,29%. Angka ini menurun sebesar 1,5%. Prevalensi *stunting* pada anak balita sebesar 27,67% pada Tahun 2019, turun 3,1% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, 7,44% balita tergolong *wasting* (kurus) (Administrator, 2019).

Prevalensi *stunting* di Indonesia bervariasi antar wilayah. *Stunting*

cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Beberapa provinsi di Indonesia memiliki tingkat *stunting* yang lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Misalnya, provinsi-provinsi di Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Maluku memiliki prevalensi *stunting* yang lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, kurangnya sanitasi yang memadai, serta tingginya angka infeksi dan penyakit pada anak-anak.

Penelitian tentang *stunting* sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustino dan Widodo (2022), tentang analisis implementasi kebijakan sosial pencegahan *stunting* di Kabupaten Malang. Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut statistik Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2018 yang mencatat setidaknya 30.323 anak *stunting* tersebut, yang terbagi kedalam dua kelompok, yakni sangat pendek dan pendek berdasarkan penggolongan dengan kriteria pengukuran tinggi badan. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Malang terdiri dari empat bidang, yakni: (1) Bidang penyuluhan dan penggerakan keluarga berencana daerah (PPKBD); (2) Bidang pengendalian penduduk; (3) Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (4) Bidang pelayanan keluarga berencana. Keempat bidang tersebut masing-masing memiliki sejumlah program kegiatan prioritas dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Malang.

Penelitian lain dilakukan (Rahman & Herwiningsih, 2021), tentang sosialisasi dan pendampingan posyandu kemboja Kelurahan Tasikmadu Kota Malang dalam mencegah *stunting*. Hasil kegiatan yang dilakukan dengan pemberian tablet pada ibu hamil untuk tambah darah sejak dinyatakan hamil, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, posyandu pro aktif mendatangi keluarga balita supaya mengikuti program imunisasi dasar lengkap, pemberian vitamin A, memperbaiki pola pikir dan pola asuh untuk balita. Selain itu, keluarga balita menjadi prioritas penerima program kampung tangguh pangan dan kesehatan di Kelurahan Tasikmadu.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah *stunting*. Program-program seperti Peningkatan Konsumsi Makanan Bergizi (PMT-Gizi), Pemberdayaan Masyarakat dan Percepatan Perbaikan Gizi (PMP-Gizi), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran gizi dan memberikan akses ke makanan bergizi, serta memperbaiki sanitasi dan kebersihan.

Selain itu, Indonesia juga berkomitmen dalam mencapai target penurunan *stunting* sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan intervensi gizi, meningkatkan ketersediaan makanan bergizi, memperkuat sistem kesehatan, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang untuk mengatasi *stunting* di Indonesia.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalansi balita *stunting* di Jawa Timur mencapai 19,2% pada tahun 2022, Target nasional 2023, *stunting* turun ke angka 14%. Provinsi ini menduduki peringkat ke-25 dengan prevalansi balita *stunting* di Indonesia tahun lalu. Jawa Timur mencatat terdapat

20 kabupaten/kota dengan prevalensi balita *stunting* diatas rata-rata angka provinsi. Sisanya, 18 kabupaten/kota dibawah angka rata-rata prevalensi balita *stunting* Sulawesi Selatan. Jadi walaupun prevalensi (presentase) *stunting* tidak besar, tetapi karena populasinya besar, maka efek agregatnya akan sangat besar untuk tingkat nasional. Karena itu Jawa Timur memang menjadi perhatian utama.

Kota Malang merupakan wilayah prevalensi balita *stunting* mencapai 18%. Kondisi ini timpang jauh dengan Kota Surabaya yang memiliki prevalensi *stunting* sebesar 4,8%. Angka ini merupakan yang terendah di wilayah Jawa Timur. Sebanyak 3.084 anak atau 8,9% di Kota Malang punya risiko *stunting*. Jumlah itu merupakan hasil bulan timbang pada bulan Februari Tahun 2023 dari 34.382 anak. Dinas Kesehatan Kota Malang terus berupaya menekan angka *stunting*. Pada Tahun 2023 ini angka *stunting* diharapkan dapat turun sekitar 5%. Kondisi *stunting* di Kota Malang disebabkan multi faktor, seperti masalah kesehatan ibu, bayi, remaja, dan juga masih adanya perkawinan anak. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh PKK serta intervensi dini kepada remaja putri dengan peningkatan gizi. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui peta potensi pengentasan *stunting* di Kota Malang serta faktor pendukung dan penghambatnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dan mengkaji penelitian-penelitian yang sebelumnya, yaitu mencari informasi terkait dengan Peta Potensi Pengentasan *Stunting* beserta data *stunting* dari berbagai referensi yang berasal dari basis data *Google Scholar* dan Pubmed. Pada proses pencarian jurnal referensi pada penelitian ini, penulis menggunakan kata kunci *Stunting*, penanganan *Stunting*, dengan algoritma serta menerapkan pembatasan tahun penerbitan yaitu Tahun 2019 – Tahun 2023. Hal tersebut diterapkan untuk mempermudah penulis dalam melakukan pencarian referensi yang terbaru terutama pada data-data *stunting* yang disajikan.

Setelah melakukan pencarian artikel dengan menggunakan kata kunci “*stunting*”, “penanganan *stunting*”, dan kriteria inklusi, hasil artikel yang memenuhi kriteria ditinjau dan diseleksi kembali agar dapat memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil pencarian dari *Google scholar* ditemukan sebanyak 200 artikel dan hasil pencarian dari Pubmed ditemukan sebanyak 200 artikel. Kemudian di seleksi menjadi 5 artikel yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

Dari 3.260 artikel publikasi yang teridentifikasi, penulis mengeluarkan beberapa publikasi yang tidak memenuhi kriteria, sehingga penulis memilih 10 artikel untuk ditinjau lebih lanjut.

Tabel 1. Artikel publikasi yang ditinjau lebih lanjut

No	Pengarang Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Agustino & Widodo	Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Malang	Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan tipe deskriptif, dan partisipan dipilih Malang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Malang terdiri dari empat bidang, yakni: (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD); (2) Bidang Pengendalian Penduduk; (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan (4) Bidang Pelayanan Keluarga Berencana. Keempat bidang tersebut masing-masing memiliki sejumlah program kegiatan prioritas dalam pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Malang.
2	Maulana, Sholihah & Wike (2022)	Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Malang	Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan implementasi kebijakan sesuai "A Model of The Policy Implementation Process" oleh Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi gizi spesifik diarahkan pada kunjungan rumah dan janji temu sebagai upaya menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas. Perlunya regulasi teknis sebagai tindak lanjut Perbup Malang Nomor 33 Tahun 2018 yang mengakomodir penanganan <i>stunting</i> melalui intervensi gizi spesifik dimasa pandemi secara optimal.
3	Surjaningrum dkk (2022)	Peta Potensi Pengentasan <i>Stunting</i> di Kota Surabaya	Penelitian ini dilakukan menggunakan <i>Focus Group Discussion</i> yang dilaksanakan bersama tim kelurahan yang terdiri dari Kader, PLKB, PKK, tim rumah Dataku, guru PAUD, serta TPK di sepuluh kelurahan di bulan September-Oktober 2022 menggunakan panduan pertanyaan yang disusun oleh tim peneliti.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penurunan <i>stunting</i> di Surabaya adalah adanya dana dan tim khusus dari pemerintah kota serta kemauan tim kelurahan dan kader untuk menjalankan program.
4	Angeli dkk (2022)	Analisis Efektivitas Program <i>Stunting</i> Tahun 2021-2022 di Desa Praya Gambar	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif.	Program <i>Stunting</i> di Desa Paya Gambar sudah efektif untuk menurunkan kasus <i>stunting</i> yang mulanya berjumlah 14 orang di tahun 2021 menurun menjadi 1 orang di tahun 2022. <i>Stunting</i> sendiri merupakan masalah kesehatan yang menjadi prioritas dan ditanggulangi kasusnya oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> . Pemerintah Indonesia sudah menargetkan untuk penurunan prevalensi <i>stunting</i> sebesar 14% di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024.

5	Hera dkk (2023)	Efektivitas Posyandu dalam Penanganan dan Pencegahan <i>Stunting: A literatur Review</i>	Penelitian ini menggunakan metode literatur revid dengan mencari literatur menggunakan <i>database</i> penelitian <i>Google scholar</i> dan Pubmed.	Hasil studi menunjukkan terdapat posyandu di beberapa daerah sudah efektif dalam penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> . Terdapat salah satu faktor yang membuat posyandu kurang efektif adalah terdapat kader yang masih kurang memahami dalam penanganan dan juga program <i>stunting</i> , karena kader merupakan orang yang sangat berperan dalam program-program yang dijalankan oleh posyandu. Program yang telah dijalankan posyandu dalam penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> yaitu dengan program fortifikasi zat besi pada makanan tambahan, pengecekan rutin tinggi badan, pemberian obat pencegahan massal cacangan, penanggulangan diare serta program sanitasi dasar. Oleh karena itu diharapkan agar peran posyandu dan kader dalam pemberian penyuluhan dan pelaksanaan program harus diperkuat guna menurunkan angka kejadian <i>stunting</i> .
---	-----------------	--	---	--

Sumber: *Olahan Peneliti, 2023*

## 2. Kondisi Stunting di Kota Malang

Menurut *website* Pemerintah Kota Malang ([malangkota.go.id](http://malangkota.go.id)) hingga bulan Juli Tahun 2022 angka *stunting* di Kota Malang berdasarkan bulan timbang yang dilaksanakan di 16 puskesmas ada di angka 9,55% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 14%. Angka *stunting* ini terus turun dari tahun ke tahun. Sebagai wujud nyata pelaksanaan agenda Pemerintah Kota Malang yang berkomitmen menurunkan angka *stunting*, maka digelar Rembuk *Stunting: Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting* Kota Malang. Walikota Malang, Drs. Sutiaji menegaskan bahwa permasalahan *stunting* bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu. Namun menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal. Oleh karena itu, rembuk *stunting* yang diikuti oleh berbagai pihak ini diharapkan dapat menyepakati program dan kegiatan pencegahan *stunting* yang terintegrasi antara intervensi spesifik dan sensitif. Walikota Malang Drs. Sutiaji berharap bahwa program harus berdampak pada

masyarakat dan selalu melibatkan potensi *pentahelix* sejak awal hingga pada tahap evaluasi.

Lebih lanjut, Drs. Sutiaji menjelaskan bahwa adanya beberapa wilayah yang tercatat tingkat *stunting*nya masih tinggi salah satunya dikarenakan oleh tingginya jumlah pasangan subur di wilayah tersebut. Seperti Tlogomas, Dinoyo angka kemiskinannya rendah tapi bukan berarti aman dari *stunting*, tapi karena pasangan usia suburnya banyak sehingga memang di wilayah tersebut potensi *stunting* juga akan tinggi. Nanti akan dikuatkan, jadi kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya akan tidak menutup kemungkinan dia mempunyai anak *stunting*.

Diharapkan dalam penanganan dan penurunan *stunting* ini harus bersama-sama, tidak bisa hanya Pemerintah Kota Malang apalagi Dinas Kesehatan. Angka 9,55 persen ini bukan merupakan yang terakhir, karena RPJMD berakhir sampai 2023 akan dimaksimalkan. Sudah ada penetapan lokasi prioritas penanganan *stunting* sesuai SK Walikota Tahun 2022 ini ada 10 lokasi, nanti kita akan bergerak bersama semuanya, tidak sendiri-sendiri.

Kota Malang terus berupaya untuk terbebas dari *stunting*. Demi akselerasi penurunan *stunting*, Pemerintah Kota Malang telah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPSS) melalui Surat Keputusan Walikota Malang tanggal 28 Maret 2022. Hal ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, untuk mencapai angka *stunting* di 14% secara nasional. Dengan terbitnya surat keputusan pembentukan TPPS ini diharapkan dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kota dan kabupaten.

Berdasarkan dari data tabulasi *stunting* PK21, diketahui ada 10 kelurahan dengan risiko *stunting* tertinggi di Kota Malang. Kelurahan Kotalama adalah yang tertinggi. Dari 4.069 keluarga sasaran ada 3.567 yang berisiko. Selanjutnya diikuti dengan Kelurahan Pandanwangi, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Bunulrejo, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Buring, dan Kelurahan Sawojajar. Perkembangan data *stunting* di Indonesia menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Tahun 2019 berada di angka 27,7% dan menurun menjadi 24,4% di Tahun 2021. Sedangkan, di Kota Malang mencapai 25,7% berdasarkan SSGI. Untuk mencapai target percepatan memang dibutuhkan sinergitas dan konvergensi yang sesungguhnya.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat penanganan *stunting* di Kota Malang dapat bervariasi, dan beberapa faktor tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

Faktor Pendukung Penanganan *Stunting* di Kota Malang sebagai berikut:

### a) Kesadaran Masyarakat.

Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* dan dampak buruknya, mereka akan cenderung lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi *stunting* pada anak-anak mereka. Kesadaran yang tinggi akan membantu masyarakat mencari informasi tentang gizi seimbang dan perawatan anak yang baik.

### b) Ketersediaan Sumber Daya.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti puskesmas dan rumah sakit, dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, adanya pusat pemulihan gizi yang memadai dan dukungan dari petugas kesehatan yang terlatih akan membantu dalam penanganan *stunting*.

### c) Program Pemberdayaan Masyarakat.

Program-program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada edukasi gizi dan perawatan anak dapat berkontribusi signifikan dalam penanganan *stunting*. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua atau pengasuh anak, mereka dapat mengambil tindakan yang tepat dalam memberikan nutrisi yang seimbang dan perawatan yang baik kepada anak-anak mereka.

### d) Kolaborasi Antar lembaga.

Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, instansi kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat upaya penanganan *stunting* di Kota Malang. Melalui kolaborasi ini, sumber daya dan keahlian dapat digabungkan untuk mengoptimalkan program-program penanganan *stunting*.

Faktor Penghambat Penanganan Stunting di Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a) Ketidaktahuan dan Ketidakpedulian.  
Jika masyarakat kurang memiliki pemahaman tentang *stunting* atau tidak menyadari dampaknya, mereka mungkin tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau mengatasi *stunting* pada anak-anak mereka. Kurangnya kesadaran ini dapat menjadi penghambat utama dalam penanganan *stunting* di Kota Malang.
- b) Keterbatasan Sumber Daya.  
Terbatasnya fasilitas kesehatan, terutama di daerah pedesaan, dan kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam penanganan *stunting* dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada anak-anak yang membutuhkannya. Ketersediaan sumber daya yang terbatas juga dapat mempengaruhi aksesibilitas terhadap nutrisi yang seimbang.
- c) Faktor Ekonomi.  
Faktor ekonomi dapat menjadi penghambat karena beberapa keluarga mungkin tidak mampu membeli makanan bergizi yang diperlukan untuk mencegah *stunting*. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dapat menyebabkan anak-anak lebih rentan terhadap *stunting*.
- d) Norma Budaya dan Tradisi.  
Beberapa norma budaya dan tradisi mungkin mempengaruhi pola makan dan perawatan anak-anak di Kota Malang. Misalnya, kebiasaan memberikan makanan yang tidak seimbang kepada anak-anak atau praktik pemberian makanan yang tidak sesuai dengan pedoman gizi dapat memperburuk risiko *stunting*.

### 3. Upaya Pencegahan

- a) Pembagian suplemen tablet untuk penambah darah bagi Ibu hamil.  
Pemberian suplemen tablet penambah darah untuk ibu hamil dinilai efektif dalam pencegahan *stunting*. Tablet tambah darah dikonsumsi minimal 90 tablet selama hamil. Namun demikian, tablet tambah darah sudah tersalurkan dengan baik kepada sasaran, namun perihal pemanfaatannya, belum terukur sebab tidak ada pengawasan ataupun pemantauan mengenai diminum atau tidaknya tablet tambah darah yang telah diberikan kepada objek sasaran.
- b) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil.  
Ibu hamil dengan status gizi tidak baik (Bumil KEK) sangat berisiko melahirkan anak *stunting*. Dengan demikian, pemberian PMT kepada bumil KEK dinilai efektif untuk mencegah/mengurangi kejadian *stunting*.
- c) Program Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap.  
Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi dinilai mampu mencegah berbagai penyakit dan infeksi pada bayi. Bayi yang sering mengalami sakit-sakitan apalagi hingga terkena infeksi akibat tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, cenderung akan terganggu/terhambat tumbuh kembangnya sehingga berpotensi untuk *stunting*. Oleh karena itu, pemberian imunisasi dasar lengkap dinilai efektif dalam mengurangi tingkat *stunting*.
- d) Pembagian Vitamin A.  
Pemberian vitamin A pada bayi dan balita dinilai memberikan manfaat sebagai anti-oksidan dan mampu mencegah infeksi pada bayi dan balita. Bayi yang sering mengalami sakit ataupun infeksi, akan mengalami gangguan dan hambatan di dalam tumbuh kembangnya, yang pada akhirnya dinilai sebagai faktor yang

dapat memengaruhi kejadian *stunting*. Oleh karena itu, pemberian vitamin A dinilai cukup efektif dalam mengurangi prevalensi *stunting*:

- Zat Besi (*Zinc*): Bayi yang mengalami diare berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang apabila sakit yang dialami berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan berulang. Oleh karena itu, pemberian zinc sebagai obat diare dinilai cukup efektif dan berkontributif dalam menurunkan risiko kejadian *stunting*.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita: Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita bagi anak yang sudah terlanjur *stunting* dianggap tidak akan memberikan kemanfaatan yang baik dalam mengintervensi *stunting*. Manfaat PMT hanya sebagai perbaikan status gizi, tetapi tidak bisa mengintervensi atau mengurangi tingkat *stunting*.

#### 4. Pembahasan

*Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan gizi khususnya pada anak-anak atau balita. *Stunting* sendiri merupakan masalah kesehatan yang menjadi prioritas dan ditanggulangi kasusnya oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membuat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan Presiden mengenai *stunting* tersebut diluncurkan pertama kali pada Tahun 2018. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan prevalensi *stunting* 14% di Tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di Tahun 2030 berdasarkan capaian Tahun 2024.

Sebagaimana yang disusun dalam Lima Pilar Percepatan Penurunan *Stunting* diantaranya adalah : 1) Komitmen dan visi kepemimpinan

tertinggi negara; 2) Kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat; 4) Mendorong kebijakan ketahanan pangan dan 5) Pemantauan dan evaluasi (Angeli, 2022).

Di samping itu, juga ditetapkan Kementerian/Lembaga penanggung jawab upaya percepatan pencegahan *stunting*, wilayah prioritas dan strategi percepatan pencegahan *stunting*, serta menyiapkan strategi kampanye nasional *stunting*. Lima pilar program *stunting* tersebut akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwasannya Pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk penurunan prevalensi *stunting* 14% di Tahun 2024.

Angka *stunting* di Kota Malang telah mencapai 8,67%. Angka ini dinilai sudah menurun dibandingkan jumlah *stunting* sebelumnya. Meskipun demikian, Walikota Malang, mengatakan masih perlu komitmen untuk terus menekan hingga mencapai *zero stunting*. Sebab itu, integrasi program antar berbagai elemen menjadi kunci keberhasilan pencegahan serta penurunan angka *stunting*. Termasuk peran serta 57 Lurah Kota Malang sebagai garda terdekat dengan

warga setempat. Lurah dapat membantu pencegahan dan penurunan *stunting* dengan mencermati status dan kondisi kesehatan warganya. Hal ini seperti dengan mengetahui data sebaran Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu dalam masa nifas, maupun bayi dua tahun. Langkah-langkah tersebut bisa diterapkan sebagai upaya mitigasi. Dengan demikian, masalah ini bukan urusan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan saja. Namun hal ini dibantu oleh masing-masing Lurah untuk mengurangi *stunting*. sehingga nanti PD (Perangkat Daerah) yang sesuai *cross cutting* bisa melakukan intervensi yang tepat.

*Cross cutting* atau *sunting silang* yang dapat dilakukan antar perangkat daerah dalam upaya penurunan balita *stunting*. Dia mencontohkan intervensi dari Dinas Kesehatan bisa berupa penanganan gizi balita. Sementara itu, DPUPRKP bisa menyediakan sanitasi air bersih. Begitu juga dengan Diskominfo melalui iklan layanan masyarakat tentang gizi ibu dan anak.

## KESIMPULAN

*Stunting* merupakan salah satu masalah kesehatan gizi khususnya pada anak-anak atau balita. Berdasarkan hasil tinjauan literatur, Walikota Malang menegaskan bahwa permasalahan *stunting* bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu. Namun menjadi tanggungjawab bersama, baik secara institutional dan personal. Di Kota Malang sendiri adanya beberapa wilayah yang tercatat tingkat *stunting*nya masih tinggi salah satunya dikarenakan oleh tingginya jumlah pasangan subur di wilayah tertentu. Jadi kesadaran masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya untuk lebih baik. Ketika pasangan subur tidak mengatur kehidupannya akan tidak menutup kemungkinan mempunyai anak *stunting*.

## SARAN

Mengingat pentingnya penanganan *stunting*, Pemerintah Kota Malang telah membentuk Tim Percepatan Penanganan *Stunting* (TPPS), kerjasama antar semua pihak dalam pengupayakan penurunan *stunting*. TPPS Kota Malang dengan dibentuk di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Semua ini diharapkan penanganan dan penurunan *stunting* dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya Pemerintah Kota Malang apalagi Dinas Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Fathur & Herwiningsih, Sri. 2021. Sosialisasi dan Pendampingan Posyandu Kemboja Kelurahan Tasikmadu Kota Malang dalam Mencegah Stunting. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol (2) No. (2): 307-312
- Angeli, Bintang Rizki, dkk. 2022. Analisis Efektivitas Program Stunting Tahun 2021-2022 di Desa Paya Gambar. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol 22 (3): 1881-1885
- Black, R. E., Allen, L. H., & Bhutta, Z. A. (2008). Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. 371(9608), 243– 260. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61690-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61690-0)
- Ministry of Rural Development and Transmigration. (2017). Buku Saku ISSN : 2774-5848 (Online) ISSN : 2774-0524 (Cetak)
- Desa Dalam Penanganan Stunting. [https://siha.kemkes.go.id/portal/file\\_upload/Buku\\_Saku\\_Stunting\\_Desa.pdf](https://siha.kemkes.go.id/portal/file_upload/Buku_Saku_Stunting_Desa.pdf)
- TNP2K. (2017). 100 KABUPATEN/KOTA PRIORITAS UNTUK INTERVENSI ANAK Kerdil (STUNTING). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). Profil Statistik Kesehatan 2019. In Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020. In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021.
- Kementerian Kesehatan RI. (2012). Ayo ke Posyandu Setiap Bulan (Vol. 1). <https://doi.org/10.1159/000317898>
- Agustino, Hutri & Widodo, Eko R. P. 2022. Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. Sospol: Jurnal Sosial Politik. Vol (8). No (2) : 241-252
- Maulana, I.N.H dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). Vol (8) No (2): 136-144
- Surjaningrum, E.R dkk. 2022. Peta Potensi Pengentasan Stunting di Kota Surabaya. National Nutrition Journal. SP (1): 97-103
- Hera, Agnes, et al., 2023. Efektivitas Posyandu Dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting : A literature Review. PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol (7) No (1): 258-269

[ Halaman Kosong ]